



## INTISARI

### **PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

Yusha Edwin Raharga<sup>1</sup> dan Supriyadi<sup>2</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan media elektronik dalam pertimbangan putusan hakim terhadap perkara perdagangan satwa yang dilindungi melalui media elektronik serta merumuskan pengaturan perdagangan satwa yang dilindungi melalui media elektronik di masa yang akan datang.

Berdasarkan fokus kajiannya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-preskriptif. Bahan penelitian dianalisis secara preskriptif dengan mencari kebenaran kualitatif. Bahan penelitian berupa data primer berupa hasil wawancara narasumber dan data sekunder berupa bahan pustaka dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Kesimpulan penelitian ini ada dua yaitu, **pertama**, penggunaan media elektronik dalam perkara perdagangan satwa yang dilindungi melalui media elektronik merupakan faktor kriminogen karena dapat membuka peluang seseorang untuk melakukan kejahatan. Kemudahan penggunaan media elektronik sebagai salah satu sebab maraknya perdagangan satwa yang dilindungi melalui media. Konvensi PBB telah memasukkan kejahatan perdagangan satwa ke dalam Kejahatan Transnasional yang Terorganisir. Mengingat hal-hal tersebut seharusnya hakim dapat menjadikan penggunaan media elektronik menjadi hal-hal yang memberatkan dalam pertimbangan putusnya untuk meningkatkan efek jera agar tujuan utama kelestarian satwa yang dilindungi dapat terjaga. **Kedua**, Penggunaan teknologi dalam modus operandi kejahatan konvensional semakin marak sehingga aturan hukum mempunyai banyak celah dalam mengungkap kejahatan. Politik hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya saat ini belum memadai. Undang-Undang konservasi belum mengatur secara tegas terkait beberapa hal yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan dan kemajuan teknologi.

Kata kunci : Perdagangan Satwa Yang Dilindungi, Media Elektronik, Undang-Undang KSDAE

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Hukum Litigasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2017, yushaedra1984@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

## ABSTRACT

### IMPLEMENTATION OF CRIMINAL LAW ON PROTECTED WILDLIFE TRADE THROUGH ELECTRONIC MEDIA

Yusha Edwin Raharga<sup>1</sup>, Supriyadi<sup>2</sup>

This research aims to identify and analyze the use of electronic media in consideration of the decision of the judges on the subject of illegal animal trade through electronic media and to formulate the trade arrangement of animal Protected through electronic media in the future.

Based on the study, it is a normative legal research. Based on its nature, this research is a descriptive-prescriptive edicians. Research materials are analyzed prescriptively by searching for qualitative truth. Research materials in the form of primary data in the form of interviewee interviews and data of the secondary are analyzed in a qualitative form.

The conclusion of this study there are two namely, first, the use of electronic media in the case of animal trade protected through electronic media is a factor of criminogen because it can open a person's opportunity to commit crimes. Ease of use of electronic media as one of the reasons for the trafficking of protected wildlife through the media. The United Nations Convention has incorporated animal trade crimes into organized transnational crime. Considering that the judges should be able to make the use of electronic media to be a concern in the consideration of its verdict to improve the deterrent effect in order to preserve the main objectives of protected wildlife can be maintained. Secondly, the use of technology in modus operandi conventional crimes increasingly margined so that the rule of law has many gaps in exposing the crime. Legal Politics Act No. 5 of 1990 on the conservation of natural resources and its ecosystem is not yet adequate. Conservation law has not firmly set up some things that are no longer relevant to the development of social, economic, cultural, environmental and technological advances.

**Keywords:** protected wildlife trade, electronic Media, KDSAE law.

---

<sup>1</sup> Postgraduate Student Faculty of Law at Master of Litigation Law, Gadjah Mada University, 2017, [yushaedra1984@gmail.com](mailto:yushaedra1984@gmail.com).

<sup>2</sup> Supervisor of the Criminal Law Department, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.